

Persepsi terhadap Proses Pengorganisasian Komunitas dalam Pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng (Kasus: Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)

Perception of Community Organizing Process in the Management of Kampung Wisata Cinangneng (Case: Cihideung Udik Village, Ciampea District, Bogor Regency, West Java)

Rinda Gustia Dwiyantri^{*)}, Ninuk Purnaningsih

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia

^{*)}E-mail korespondensi : rindagustia6@gmail.com

Diterima: 10-06-2020 | Disetujui: 01-03-2022 | Publikasi online: 20-01-2022

ABSTRACT

The tourism village is a village that offers a variety of uniqueness and distinctiveness from the village, such as the tradition and cultural uniqueness that is still maintained its authenticity and natural beauty. Kampung Wisata Cinangneng is one of the tourist villages that involve the community in its management. Participating communities need to be organized according to their interests and directed at each stage of the activity. This study aims to analyze community organizing in the management of Cinangneng Tourism Village and its relationship with internal and external factors. This research method uses quantitative and qualitative methods using census techniques. This research was conducted in Kampung Wisata Cinangneng, Cihideung Udik Village, Ciampea District, Bogor Regency. Respondents in this study were 36 people who were actively involved in the management of Kampung Wisata Cinangneng. The results showed that internal factors that have a relationship with community organizing are the level of education and individual capacity. An external factor that has a relationship with community organizing is the role of the initiator.

Keywords: effectiveness, media promotion, Instagram, tourism

ABSTRAK

Desa wisata merupakan suatu desa yang menawarkan berbagai keunikan dan kekhasan dari desa, seperti kekhasan tradisi dan budaya yang masih terjaga keasliannya serta keindahan alamnya. Kampung Wisata Cinangneng merupakan salah satu desa wisata yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Masyarakat yang berpartisipasi perlu diorganisir menurut kepentingannya dan diarahkan dalam setiap tahap-tahap kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng serta hubungannya dengan faktor internal dan faktor eksternal. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan teknik sensus. Penelitian ini dilakukan di Kampung Wisata Cinangneng, Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Responden dalam penelitian ini sebanyak 36 orang yaitu masyarakat yang aktif terlibat dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal yang memiliki hubungan dengan pengorganisasian komunitas adalah tingkat pendidikan dan kapasitas individu. Faktor eksternal yang memiliki hubungan dengan pengorganisasian komunitas adalah peran inisiator.

Keywords: efektivitas, media promosi, Instagram, wisata



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

PENDAHULUAN

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan (Sidiq dan Resnawati 2017). Tercatat dari Potensi Desa (Podes) 2018, terdapat 1.734 desa wisata di seluruh Indonesia. Setiap desa mempunyai potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan baik dari segi keindahan sumberdaya alam maupun kekhasan tradisi dan budaya masyarakat yang masih terjaga keasliannya. Potensi-potensi tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan agar membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Secara ekonomi desa wisata memberi dampak dalam perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan masyarakat. Adanya desa wisata pun dapat menurunkan angka pengangguran di desa tersebut.

Secara umum, pemberdayaan mengandung arti proses menuju berdaya. Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian langkah- langkah yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menjadi berdaya (Wahyuni 2018). Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan yaitu adanya pengembangan potensi desa menjadi desa wisata. Desa wisata yang dikelola oleh masyarakat sebagai bentuk upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Pengorganisasian sebagai strategi pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan desa dan memiliki peranan yang penting (Kusumawarta 2018). Peran pengorganisasian diperlukan dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat. Pengorganisasian akan berjalan jika komitmen masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut ada (Bezboruah 2013). Pengorganisasian komunitas merupakan salah satu proses yang memobilisasi komunitas untuk mencapai atau berbuat tindakan bersama demi kepentingan komunitas dan memberikan dampak bagi komunitasnya (Andini 2013). Diperlukannya pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan desa wisata untuk melihat sejauh apa peran komunitas dalam pengelolaan desa wisata. Peran serta masyarakat juga diperlukan untuk melakukan tindakan kolektif dalam pengelolaan desa wisata. Keterlibatan masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan pengembangan desa wisata karena mereka yang mengetahui tentang permasalahan, hambatan atau kendala, dan kebutuhan mereka sendiri dalam pengelolaan desa wisata. Hal tersebut juga tercantum pada Undang Undang RI No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam pasal 19 ayat 2 yaitu setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas; menjadi pekerja/buruh, konsinyasi; dan/atau pengelolaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan desa wisata.

Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah salah satu desa yang mempunyai desa wisata dengan menawarkan kekhasan tradisi dan budaya sunda yang dipadukan dengan konsep agrowisata. Desa wisata tersebut bernama Kampung Wisata Cinangneng. Kampung Wisata Cinangneng merupakan salah satu desa wisata berbasis masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Kampung Wisata Cinangneng berdiri sejak tahun 2000. Tujuan dari adanya Kampung Wisata Cinangneng adalah sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Kusumawarta (2018), diketahui bahwa level pengorganisasian komunitas berada pada level pengembangan komunitas lokal yaitu tujuan pengorganisasian untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Kemandirian yang dimaksud adalah masyarakat mampu memecahkan masalah secara kooperatif berdasarkan kemauan diri sendiri. Pada penelitian-penelitian terdahulu masih sedikit yang meneliti pengorganisasian komunitas dan belum ada yang mengidentifikasi lebih jauh faktor-faktor yang memengaruhinya. Pada penelitian ini penulis ingin menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan desa wisata. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian tentang persepsi terhadap proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng.

Tujuan penulisan skripsi terkait “Persepsi terhadap proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng” ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi persepsi terhadap proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng
2. Menganalisis hubungan antara faktor internal dengan persepsi terhadap proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng

3. Menganalisis hubungan antara faktor eksternal dengan persepsi terhadap proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng

PENDEKATAN TEORITIS

Pengorganisasian Komunitas

Menurut Andini (2013) masyarakat memiliki kapasitas dan modal sosial yang berbeda, oleh karena itu pengorganisasian masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat perlu diorganisasi berdasarkan kepentingannya. Kepada masyarakat, baik secara individual ataupun kelompok, akan diserahkan tugas-tugas sesuai dengan keperluan pengembangan masyarakat (Nasdian 2014). Menurut Andini (2013) pengorganisasian komunitas merupakan suatu bentuk mobilisasi komunitas untuk melakukan tindakan kolektif. Proses ini menolong masyarakat agar paham dengan persoalan bersama dan bersama-sama menyelesaikannya. Proses ini dibangun dari keterikatan sosial untuk melakukan tindak bersama (*collective action*). Bezboruah (2013) juga menjelaskan pengorganisasian masyarakat adalah proses komprehensif untuk mengelola perubahan dalam sebuah masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pembahasan tentang visi bersama, isu yang menonjol dari perencanaan dan implementasi strategi. Terdapat peran penting masyarakat dan organisasi akar rumput agar tujuan mengorganisir masyarakat bisa tercapai.

Andini (2013) menjelaskan indikator-indikator yang menjadi tahapan atau proses pengorganisasian komunitas dalam pengembangan desa wisata, yaitu:

Integrasi. Proses integrasi ini merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan pihak inisiator dari luar yang ikut mengorganisasikan masyarakat dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat untuk bekerja bersama-sama. Tahap integrasi ini perlu juga dipertimbangkan opsi pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan agrowisata dengan melihat potensi alam yang dimilikinya dan prasyarat-prasyarat lainnya.

Pemetaan Isu, Permasalahan, dan Potensi Komunitas. Langkah ini dilakukan secara kolektif dan bersama-sama dengan masyarakat, seperti dengan diskusi atau survey lapangan serta menganalisis target group dari pengembangan kawasan desa wisata ini.

Merancang Tindakan-Tindakan Bersama. Tindakan kolektif ini disusun berdasarkan isu, permasalahan, dan potensi pengembangan desa wisata yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendiskusian dan perancangan tindakan kolektif ini dapat dilakukan dalam bentuk musyawarah atau rapat dengan tokoh-tokoh komunitas yang dianggap mampu merepresentasikan komunitas secara keseluruhan. Tindakan kolektif ini diambil untuk mencapai tujuan bersama komunitas dalam pengembangan desa wisata.

Implementasi Kegiatan. Tahap ini juga diharapkan adanya partisipasi dari setiap anggota komunitas dan perlu dipastikan adanya penerahan sumber daya untuk kepentingan komunitas dalam pengembangan desa wisata.

Monitoring dan Evaluasi. Langkah ini penting dilakukan agar kesalahan-kesalahan dalam perancangan kegiatan pengembangan desa wisata tidak dilakukan lagi di masa mendatang dan komunitas semakin mengenal langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi komunitasnya dan dalam pengembangan desa wisata.

Refleksi. Refleksi menggambarkan kemampuan komunitas dalam melihat nilai-nilai positif dan negatif dari proses pengorganisasian komunitas dalam pengembangan desa wisata yang telah dilakukan.

Feedback. Tahap ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dari pengembangan kawasan desa wisata. Masukan-masukan hasil dari pengawasan, evaluasi, dan refleksi masyarakat dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan manfaat dan kesejahteraan masyarakat dari adanya kegiatan desa wisata tersebut.

Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Pengorganisasian Komunitas dalam Pengelolaan Desa Wisata

Menurut (Junaid dan Salim 2019) kesuksesan pengelolaan potensi desa melalui pariwisata sangat tergantung pada faktor-faktor penunjang atau pendukung baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri.

Faktor internal yang berkaitan dengan pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan desa wisata diantaranya:

Tingkat Pendidikan. Sumberdaya manusia merupakan salah satu sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu sumber daya manusia yang ada di kawasan wisata dapat dimanfaatkan dan direkrut untuk melakukan pengelolaan pariwisata di daerahnya, hal ini harus ditunjang oleh pendidikan dan keterampilan di bidang pariwisata yang baik (Prasetya dan Ansar 2017). Syafi'I dan Suwandono (2015) menjelaskan dalam pengelolaan desa wisata memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu pendidikan masyarakat sangatlah penting.

Kapasitas Individu. Kapasitas individu adalah kemampuan individu dalam mengelola desa wisata. Individu yang dimaksud adalah pihak- pihak yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Kapasitas individu dalam mengembangkan potensi wisata menjadi atraksi wisata sesuai dengan kapasitas dan peran yang dimiliki individu (Pratitri dan Damayanti 2016). Berdasarkan pada penelitian Noho (2014) indikator kapasitas individu dalam pengelolaan desa wisata meliputi kesadaran dalam merintis pengembangan potensi wisata, pengetahuan tentang konsep desa wisata, keterampilan melayani wisatawan, keterampilan mengolah souvenir atau cinderamata dan kemampuan mengelola atraksi wisata.

Keinginan Untuk Terlibat. Imran (2012) berpendapat bahwa keterlibatan komunitas lokal dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan wisata erat kaitannya dengan konsep ekowisata dan sekaligus dapat membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal. Masyarakat yang bergabung menjadi anggota komunitas masyarakat bisa ikut serta untuk aktif terlibat di dalam setiap pengelolaan kegiatan wisata (Purmada *et.al* 2016). Hal tersebut sesuai pada penelitian Purbasari dan Asnawi (2014) masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata sangat banyak, karena berbasis aktivitas masyarakat yang dijadikan daya tarik. Masyarakat menjadi lebih mandiri dan menggantungkan pada kemampuan mereka sendiri untuk mengembangkan daya tarik wisata. Keterlibatan masyarakat sangat diperhitungkan, sehingga adanya manfaat pariwisata yang dirasakan oleh semua masyarakat. Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu keberhasilan pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Putri dan Manaf (2013) bahwa keterlibatan masyarakat luas sebagai pelaku utama terlihat di dalam embrio. Embrio merupakan aktivitas masyarakat dalam keseharian mereka yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Di Dalam embrio ini yang berperan adalah sekelompok masyarakat yang memiliki keahlian atau ketertarikan yang sama di bidang embrio tersebut. Mereka merencanakan, mengelola dan mempekerjakan diri mereka sendiri di dalam embrio tersebut di kegiatan pariwisata. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola desa wisata salah satunya yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal (Imran 2012). Penelitian Putri dan Manaf (2013) menjelaskan bahwa salah satu pelibatan masyarakat yaitu adanya musyawarah bersama untuk merencanakan dan mengelola usaha kepariwisataan.

Faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar individu dapat berupa lingkungan yang dapat mempengaruhi individu dalam melakukan sesuatu (Junaid dan Salim 2019). Adapun faktor eksternal yang berkaitan dengan pengorganisasian komunitas meliputi:

Kesesuaian Atraksi Wisata. Atraksi wisata merupakan segala bentuk kegiatan wisata yang ditawarkan pihak pengelola untuk menarik minat pengunjung untuk berkunjung. Pengelolaan atraksi wisata berkaitan dengan proses yang terencana dan terkoordinasi untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya pariwisata untuk mendatangkan wisatawan di desa wisata melalui serangkaian tindakan terpadu (Noho 2014). Desa wisata membuat atraksi wisata berdasarkan potensi alam yang mereka miliki (Putri dan Manaf 2013). Pengelola desa wisata harus menyadari bahwa desa wisata harus memperlihatkan keberagaman atraksi wisata sehingga atraksi wisata tidak terkesan monoton. Penggabungan atraksi wisata tersebut dapat dilakukan dengan memadukan potensi wisata alam dengan potensi wisata budaya.

Kesesuaian Pelayanan Wisata. Pelayanan wisata merupakan segala bentuk jasa atau fasilitas yang dilakukan oleh pengelola desa wisata guna memenuhi harapan konsumen. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Noho (2014) bahwa pelayanan terhadap wisatawan merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam mempertahankan kunjungan desa wisata. Perkembangan pariwisata di suatu kawasan wisata tentunya membawa perubahan pada fasilitas-fasilitas penunjang wisata. Semakin ramai tempat wisata oleh wisatawan, maka kualitas dari fasilitas wisata tentu akan semakin diperhatikan.

Peran Inisiator. Peran inisiator sangat berpengaruh dalam proses pengorganisasian komunitas. Peran inisiator dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aktor- aktor yang nantinya akan terlibat dalam pengelolaan desa wisata (Andini 2013). Pada penelitian Putri dan Manaf (2013)

tokoh penggerak atau inisiator merupakan salah satu karakteristik pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat yaitu bersifat kreatif, memiliki jiwa sosial dan merupakan *pioneer* pokdarwis di Dieng dan berperan dalam membuat *event Dieng Culture Festival* hingga *event* ke-4, serta memiliki kedekatan dengan *stakeholder* penting terutama pemerintah pusat yang sangat dekat. Penelitian Putra (2013) juga menjelaskan bahwa ketua pokdarwis lah yang paling terlihat dominan dalam mengkoordinasikan masyarakat untuk mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas, baik memobilisasi pembayaran iuran sukarela untuk penyediaan fasilitas desa maupun mendorong ikut dalam proses pembuatan atau pembangunan suatu fasilitas.

Peran stakeholder. Pelaksanaan konsep pengembangan ekowisata tentunya diperlukan partisipasi yang cukup baik dari para *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata. Pelaksanaan pengelolaan ekowisata tentunya tidak dapat terlaksana apabila para *stakeholder* yang terlibat ini tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan mengembangkannya (Pamungkas 2013). Aktor-aktor yang berperan dalam pola kemitraan desa wisata terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah. Pada penelitian Isnaningtyas (2017) peran pemerintah dibuktikan dengan diterbitkannya SK yang mengatur tentang desa wisata dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator yang menghubungkan pokdarwis dengan pihak swasta. Adapun bentuk kemitraan yang melibatkan aktor non-pemerintah sebagian besar adalah lewat pemberian dana CSR yang diberikan oleh mitra swasta kepada masyarakat.

Community Based Tourism

Community Based Tourism merupakan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Hal ini tentunya mempermudah dalam pengembangan serta pengelolaannya, karena masyarakat tentunya lebih memahami kondisi pariwisata yang mereka miliki dan kembangkan sendiri (Purbasari dan Asnawi 2014). Menurut Purmada *et al.* (2016) pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat, tidak terjadi pada pariwisata konvensional yang memprioritaskan jumlah pengunjung dengan mengabaikan atau kurang memperhatikan partisipasi masyarakat lokal.

Suansri (2003) menjelaskan beberapa prinsip dasar *community based tourism* yaitu: 1) mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata; 2) mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek; 3) mengembangkan kebanggaan komunitas; 4) mengembangkan kualitas hidup komunitas; 5) menjamin keberlanjutan lingkungan; 6) mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal; 7) membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas; 8) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia; 9) mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas; 10) berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek yang ada di komunitas.

KERANGKA PEMIKIRAN

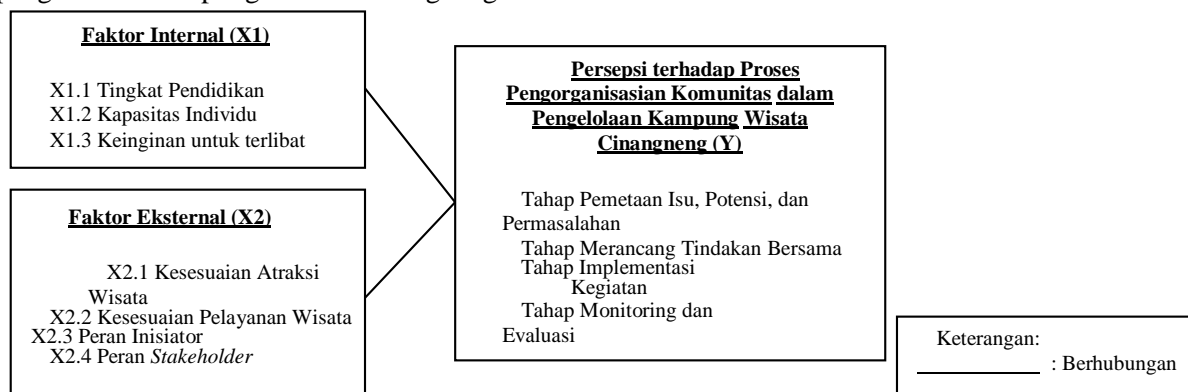
Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah salah satu desa yang mempunyai potensi wisata dengan menawarkan kekhasan tradisi dan budaya sunda yang dipadukan dengan konsep agrowisata. Desa wisata tersebut bernama Kampung Wisata Cinangneng. Kampung Wisata Cinangneng merupakan salah satu desa wisata berbasis masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.

Suatu desa wisata yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya perlu diorganisir menurut kepentingannya. Pengorganisasian komunitas penting dilakukan untuk mengarahkan masyarakat untuk bertindak. Demi terorganisirnya pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng maka diperlukannya pengorganisasian komunitas. Pengorganisasian komunitas merupakan suatu proses untuk melakukan tindakan kolektif dengan membaginya pada tahap-tahap kegiatan. Menurut Andini (2013) proses pengorganisasian komunitas terdapat tujuh tahapan yaitu, tahap integrasi, tahap pemetaan isu, potensi dan permasalahan, tahap merancang tindakan bersama, tahap implementasi kegiatan, tahap evaluasi, tahap refleksi dan *feedback*. Namun pada penelitian ini, peneliti menyederhanakan proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng menjadi (1) tahap pemetaan isu, potensi dan permasalahan; (2) tahap merancang tindakan bersama; (3) tahap implementasi kegiatan; dan (4) monitoring dan evaluasi. Hal tersebut disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu fokus kepada pengorganisasian komunitas pada pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng serta empat tahap tersebut sudah dapat menjelaskan pengorganisasian yang dilakukan komunitas.

Tahap pemetaan isu, potensi dan permasalahan ialah tahap dimana seluruh anggota komunitas secara kolektif menganalisis isu, potensi, dan permasalahan yang dialami. Tahap merancang tindakan bersama ialah tahap dimana tindakan kolektif disusun berdasarkan isu, potensi dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tahap implementasi kegiatan ialah tahap dimana seluruh anggota komunitas berpartisipasi dalam pengelolaan desa wisata. Tahap monitoring dan evaluasi ialah tahap dimana adanya pengawasan dan penilaian terhadap pengelolaan desa wisata yang sudah dijalankan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pengelolaan desa wisata.

Peneliti menduga setiap anggota komunitas mempunyai karakteristik mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi mereka pada pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan desa wisata. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pengorganisasian komunitas. Faktor internal adalah faktor yang terdapat pada dalam diri individu. Faktor internal yang berkaitan dengan proses pengorganisasian komunitas diantaranya tingkat pendidikan, kapasitas individu dan keinginan untuk terlibat. Hubungan tingkat pendidikan dengan pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan desa wisata yaitu dibutuhkan sumberdaya manusia yang terampil dan berkualitas agar dapat mengelola desa wisata dengan baik. Hal tersebut dijelaskan oleh Syafi’I dan Suwandono (2015) bahwa dalam pengelolaan desa wisata memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, oleh karena itu pendidikan masyarakat sangatlah penting. Hubungan antara kapasitas individu dengan pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan desa wisata yaitu dimana pembagian tugas atau peran dalam pengelolaan desa wisata harus disesuaikan dengan kemampuan anggota komunitas. Keterlibatan komunitas juga menjadi sangat penting dalam pengelolaan desa wisata. Hal tersebut dilihat dari sejauh mana keinginan mereka untuk terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Hubungan antara keinginan individu untuk terlibat dengan pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan desa wisata yaitu dimana keterlibatan masyarakat dalam mengelola desa wisata perlu diorganisir.

Adapun faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu yang dapat mendukung individu tersebut dalam bertindak. Faktor eksternal yang berkaitan dengan proses pengorganisasian komunitas diantaranya atraksi wisata, pelayanan wisata, peran inisiator dan peran *stakeholder*. Berbagai bentuk atraksi wisata dan pelayanan wisata yang dikelola oleh seluruh anggota komunitas dikelola berdasarkan sumberdaya yang ada dan kemampuan komunitas dalam mengelolanya. Hubungan antara kesesuaian atraksi wisata dengan pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan desa wisata yaitu dengan adanya atraksi wisata yang sesuai dengan sumberdaya alam, minat, keahlian masyarakat serta sumberdaya yang ada dapat memudahkan dalam mengorganisir komunitas dalam pengelolaan desa wisata. Hubungan antara kesesuaian pelayanan wisata dalam pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan desa wisata yaitu dengan adanya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat memudahkan dalam mengorganisir komunitas dalam pengelolaan desa wisata. Pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan desa wisata juga tidak terlepas dari adanya peran inisiator dan peran *stakeholder*. Peran inisiator dalam pengelolaan desa wisata juga berpengaruh dalam proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan desa wisata. Andini (2013) mengatakan dibutuhkan peran inisiator untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aktor-aktor yang nantinya akan terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Peran *stakeholder* juga penting dalam membantu mensukseskan pengelolaan desa wisata. Faktor-faktor tersebut diduga dapat mendukung pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka yang telah dijelaskan di atas, hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diduga terdapat hubungan antara faktor internal (tingkat pendidikan, kapasitas individu dan keinginan untuk terlibat) dengan persepsi terhadap proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan desa wisata Kampung Wisata Cinangneng.
2. Diduga terdapat hubungan antara faktor eksternal (kesesuaian atraksi wisata, kesesuaian pelayanan wisata, peran inisiator dan peran *stakeholder*) dengan persepsi terhadap proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng.

PENDEKATAN LAPANGAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang didukung dengan metode kualitatif untuk memperkaya data dan informasi yang diperoleh. Pemilihan responden dilakukan melalui pengambilan sampel jenuh atau sensus. Sensus merupakan teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi diambil sebagai anggota sampel yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen kuesioner kepada 36 responden. Metode kuantitatif ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan dan responden yang berpartisipasi dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng sehingga data yang didapatkan lebih akurat. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan instrumen panduan pertanyaan tertulis. Informasi yang diperoleh ini digunakan sebagai masukan untuk menyempurnakan pertanyaan dalam kuesioner.

Penelitian ini dilakukan di Kampung Wisata Cinangneng, Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*). Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dari mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan Februari 2020.

Sumber data dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota komunitas yang aktif terlibat dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 36 orang. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang berpartisipasi dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng. Responden merupakan orang-orang yang dipilih untuk menceritakan mengenai dirinya sendiri atau yang mengalami langsung fenomena sosial yang terjadi sesuai penelitian. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik sensus sehingga semua populasi yang ada di lokasi penelitian menjadi responden. Sampel penelitian berjumlah 36 responden. Responden akan diwawancarai oleh peneliti sesuai dengan kuesioner yang telah dibuat.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung di lapangan dari responden dan informan. Data sekunder diperoleh dari hasil literatur, dokumen-dokumen maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2010* untuk membuat buku kode (*code book*) dalam bentuk tabel, membuat tabel frekuensi berdasarkan data-data responden, dan tabulasi silang untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam penelitian. Pengujian variabel diuji dengan menggunakan uji korelasi *Rank Spearman* melalui *IBM SPSS Statistics 25.0 for Windows* untuk melihat hubungan yang nyata antar variabel dengan data berbentuk ordinal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Cihideung Udik

Desa Cihideung Udik merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 284 Ha, di atas permukaan Laut 600 m, dan tinggi curah hujan 300-600 m³ yang terbagi dalam 15 Rukun Warga (RW) dan 48 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Desa Cihideung Udik pada akhir September tahun 2018 berjumlah 15.592 jiwa yang terdiri dari 7.797 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 7.795 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 4.250 KK. Sebagian besar penduduk menempuh pendidikan hanya sampai dengan tingkat SD/ sederajat yaitu sebanyak 3.773 jiwa.

Sejarah Kampung Wisata Cinangneng

Kampung Wisata Cinangneng dipelopori oleh Hester Basoeki pada tahun 1991. Awalnya Hester Basoeki ingin mendirikan rumah keluarga atau villa sebagai tempat peristirahatan yang bernama *HB Garden Guest House*. Namun, tempat tersebut tidak dikhususkan sebagai kegiatan wisata. Kampung Wisata Cinangneng pada awalnya hanya terdapat satu rumah dengan dua kamar yang diberi nama Balai Kampung. Hester Basoeki mulai mengkomersilkan penginapan tersebut karena tanpa sengaja menawarkan tempat peristirahatannya yang berada di Kampung Cinangneng kepada wisatawan asal Amerika yang menginap di *Guest House* miliknya. Kampung Wisata Cinangneng mendapat respon yang sangat baik dari wisatawan sehingga Hester mulai memikirkan paket-paket wisata apa yang menarik yang dapat ditawarkan kepada wisatawan lainnya dengan melibatkan masyarakat sebagai pengelolanya. Keberadaan Kampung Wisata Cinangneng memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kegiatan pariwisata yang diusung oleh Kampung Wisata Cinangneng adalah salah satu konsep kegiatan pariwisata agro berbasis alam dan kebudayaan Jawa Barat. Program kegiatan wisata yang dilakukan tidak hanya terbatas pada satu kawasan saja melainkan mencakup lingkungan sekitar Kampung Wisata Cinangneng yang melibatkan masyarakat setempat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Program andalan di Kampung Wisata Cinangneng adalah program “Poelang Kampoeng”. Terdapat usaha *home industry* milik masyarakat setempat yaitu pengrajin keset dan tas yang sudah termasuk ke dalam paket wisata yang ditawarkan kepada pengunjung yaitu paket “tour kampoeng”. Selain *home industry*, terdapat juga penjual souvenir milik masyarakat dimana pengunjung yang datang dapat membeli souvenir tersebut sebagai cenderamata atau oleh-oleh. Souvenir yang tersedia antara lain topi caping, wayang golek, mainan miniatur seperti motor, mobil, becak, dan sepeda yang terbuat dari kayu, tas anyaman, dan masih banyak lagi. Hasil penjualan tersebut diberikan langsung kepada masing-masing pengrajin. Gamelan yang diberikan oleh Departemen Pariwisata Seni dan Budaya merupakan kepemilikan Kampung Wisata Cinangneng sebagai salah satu aset bersama komunitas. Sawah dan kerbau yang ada di Kampung Wisata Cinangneng merupakan milik masyarakat setempat. Hasil keuntungan dari kegiatan wisata disisihkan untuk pengembangan Kampung Wisata Cinangneng seperti pengembangan atau perbaikan sarana prasarana. Masyarakat yang menjadi pemandu wisata juga mendapatkan hasil keuntungan wisata yang telah disepakati secara bersama oleh komunitas.

Faktor Internal

Faktor internal dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pendidikan, kapasitas individu dan keinginan untuk terlibat. Mayoritas tingkat pendidikan responden berada pada kategori sedang yaitu masyarakat yang berpendidikan lulusan SMP dan SMA/SMK atau sederajat. Kapasitas individu responden berada pada kategori tinggi. Mayoritas keinginan untuk terlibat responden berada pada kategori sedang.

Struktur Organisasi Kampung Wisata Cinangneng

Struktur organisasi Kampung Wisata Cinangneng terbagi menjadi ketua, manager dan kepala bagian. Hester Basoeki selaku ketua dan inisiator Kampung Wisata Cinangneng bertugas melakukan pemantauan terhadap kegiatan operasional Kampung Wisata Cinangneng. Manajer operasional bertugas dan bertanggung jawab membuat perencanaan, menjalin komunikasi dengan kepala bagian. Terdapat empat operasional departemen yaitu *customer service*, bagian program, bagian dapur dan bagian *training*. *Customer service* bertanggung jawab atas reservasi kamar dan pelayanan di *caffeteria*. Bagian program bertanggung jawab untuk mengatur perencanaan program, mengatur keberhasilan jalannya program/paket wisata dan mengatur para pemandu. Bagian dapur bertanggung jawab sebagai juru masak, pengelolaan makanan dan minuman. Bagian *training* bertanggung jawab pada pengembang sumberdaya manusia seperti para pemandu, penari dll.

Manajer umum bertugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional apabila terjadi *maintenance* (melakukan pemeliharaan alat musik tradisional, dsb). Manajer umum membawahi empat departemen yaitu bagian umum, bagian *go green*, bagian humas dan bagian parkir dan keamanan. Bagian umum bertanggung jawab atas perlengkapan, pemeliharaan gedung dan kamar penginapan. Bagian *go green* bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan. Bagian humas bertanggung jawab dalam menjalin dan menjaga hubungan publik serta mendefinisikan tujuan dan publik. Bagian parkir dan keamanan bertanggung jawab untuk mengatur area parkir dan keamanan kawasan Kampung Wisata

Cinangneng. Bagian keuangan bertanggung jawab di tempat reservasi dan melakukan semua pendataan/pengadministrasian transaksi keuangan (membuat laporan keuangan).

Faktor Eksternal

Faktor eksternal pada penelitian ini yaitu kesesuaian atraksi wisata, kesesuaian pelayanan wisata, peran inisiator dan peran *stakeholder*. Atraksi wisata di Kampung Wisata Cinangneng berada pada kategori sangat sesuai. Pelayanan wisata sebagian besar sudah termasuk pada kategori mendukung. Sebagian besar peran inisiator dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng berada pada kategori sedang. Peran *stakeholder* dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng tergolong sedang.

Persepsi terhadap Proses Pengorganisasian Komunitas dalam Pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng

Proses pengorganisasian dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng dibagi kedalam empat tahap yaitu (1) tahap pemetaan isu, potensi dan permasalahan; (2) tahap merancang tindakan bersama; (3) tahap implementasi kegiatan; dan (4) tahap monitoring dan evaluasi. Persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas pada tahap pemetaan isu, potensi dan permasalahan termasuk pada kategori cukup terorganisir. Hal tersebut terjadi karena tidak semua dilibatkan dalam diskusi untuk membahas mengenai isu, potensi atau permasalahan terkait pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng ataupun kegiatan wisatanya itu sendiri. Seperti adanya potensi kegiatan wisata baru atau yang diganti karena alasan tertentu. Survey lapangan juga tidak melibatkan seluruh anggota komunitas melainkan hanya beberapa saja.

Pada tahap merancang tindakan bersama persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng tergolong tidak terorganisir. Hal tersebut dikarenakan rapat perencanaan kegiatan wisata hanya dilakukan oleh para manajer dan kepala bagian yang juga masyarakat yang terlibat sebagai pengelola. Rapat perencanaan tersebut untuk membahas terkait pembagian peran atau tugas pada pelaksanaan kegiatan wisata. Pembagian tugas tergantung pada jumlah pengunjung yang datang. Semakin banyak pengunjung yang datang maka semakin banyak pula masyarakat yang dilibatkan. Pembagian tugas tersebut hanya diinformasikan via grup *whatsapp*.

Persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas pada tahap implementasi kegiatan dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng tergolong terorganisir. Hal tersebut dikarenakan pengarahan (*briefing*) selalu rutin dilakukan setiap pagi sebelum pengunjung datang untuk membahas terkait teknis lapang seperti pembagian kelompok untuk pengunjung, lokasi setiap kegiatan, susunan kegiatan wisata dll. Pengunjung yang datang biasanya dari sekolah- sekolah dan bersifat rombongan. Hal tersebut sesuai dengan konsep wisata di Kampung Wisata Cinangneng yaitu bersifat edukasi. Berdasarkan data di lapang, pembagian tugas dibentuk berdasarkan keahlian para anggota komunitas seperti pemandu yang memang sudah dilatih kurang lebih selama tiga bulan. Tidak menutup kemungkinan jika banyaknya pengunjung yang datang kurang lebih sekitar 500 orang, anggota komunitas yang bertugas selain menjadi pemandu pun ikut membantu pemandu dan begitupun sebaliknya. Sebagian besar anggota komunitas berperan aktif ketika pelaksanaan kegiatan wisata.

Pada tahap monitoring dan evaluasi persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng tergolong terorganisir. Hal tersebut dikarenakan rapat evaluasi dilakukan ketika ada permasalahan seperti adanya keluhan dari pengunjung yang datang atau adanya kendala terkait pelaksanaan kegiatan wisata yang tidak sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Rapat evaluasi tersebut dilakukan bersama-sama dengan seluruh anggota komunitas untuk membahas permasalahan yang terjadi. Sebagian besar anggota komunitas aktif dalam menyampaikan pendapat sehingga menghasilkan rekomendasi lanjutan terkait pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng kedepannya. Selain rapat evaluasi, pemantauan pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng juga dilakukan oleh manajer dan masing-masing kepala bagian maupun ketua.

Hubungan antara Faktor Internal dengan Persepsi terhadap Proses Pengorganisasian Komunitas

Faktor internal responden terdiri dari tingkat pendidikan, kapasitas individu dan keinginan untuk terlibat. Faktor internal dilakukan uji korelasi *Rank Spearman* untuk melihat hubungan data ordinal. Tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi terhadap proses pengorganisasian komunitas dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.443 dan nilai signifikan sebesar

0.007. Tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan pengorganisasian pada tahap implementasi kegiatan. Hasil temuan lapang menunjukkan meskipun pendidikan responden rendah, masyarakat yang menjadi pengelola Kampung Wisata Cinangneng mendapatkan keahlian dan kemampuan baru karena diberikannya pelatihan. Hal tersebut menyebabkan pengorganisasian dalam pelaksanaan kegiatan wisata dapat terorganisir dengan baik karena adanya pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian para masyarakat. Tingkat pendidikan juga memiliki hubungan yang signifikan dengan pengorganisasian komunitas pada tahap monitoring dan evaluasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya pendidikan responden menunjukkan kurangnya kemampuannya dalam menilai pelaksanaan kegiatan wisata setelah kegiatan wisata berlangsung. Sedangkan pengorganisasian komunitas pada tahap implementasi, potensi dan permasalahan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pendidikan. Hal tersebut dikarenakan dalam kegiatan pemetaan isu, potensi dan permasalahan tidak dibatasi oleh tingkat pendidikan responden. Pada tahap merancang tindakan bersama juga tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pendidikan. Hal tersebut dikarenakan dalam perencanaan kegiatan wisata hanya dilakukan oleh manajer dan ketua bagian yang menjadi perwakilan anggota komunitas.

Kapasitas individu memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.549 dan nilai signifikan sebesar 0.001. Kapasitas individu memiliki hubungan yang signifikan dengan pengorganisasian komunitas pada tahap pemetaan isu, potensi dan permasalahan. Hal tersebut disebabkan tingginya kapasitas individu dalam mengelola Kampung Wisata Cinangneng yang dilihat dari kemampuan responden dalam mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan Kampung Wisata Cinangneng. Kekurangan yang ada diperbaiki agar Kampung Wisata Cinangneng selalu berkembang dan mempunyai daya tarik bagi pengunjung. Kapasitas individu tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pengorganisasian komunitas pada tahap merancang tindakan bersama, implementasi kegiatan dan monitoring dan evaluasi. Hal tersebut dikarenakan perencanaan kegiatan wisata dilakukan oleh manajer dan kepala bagian yang sudah dianggap dapat mewakili anggota komunitas dalam perencanaan terkait kegiatan wisata. Kemampuan yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh pada terorganisirnya dalam perencanaan kegiatan wisata. Sebagian besar pengelola mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan wisata setelah diberikan atau difasilitasi pelatihan-pelatihan oleh inisiator sehingga dalam pelaksanaannya akan tetap berjalan dengan baik. Pada kegiatan evaluasi pun semua anggota komunitas tidak dibatasi berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Semua anggota berhak menilai kekurangan atau kelebihan maupun hambatan selama kegiatan wisata berlangsung dan semua anggota berhak memberikan saran atau rekomendasi lanjutan.

Keinginan untuk terlibat tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas pada setiap tahapannya dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.081 dan nilai signifikan sebesar 0.639. Hal tersebut ditunjukkan dengan meskipun keinginan untuk terlibat responden dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng tergolong rendah, namun dalam pelaksanaannya anggota komunitas tetap melaksanakan tugas atau perannya dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng.

Hubungan antara Faktor Eksternal dengan Persepsi terhadap Proses Pengorganisasian Komunitas

Faktor eksternal responden terdiri dari kesesuaian atraksi wisata, kesesuaian pelayanan wisata, peran inisiator dan peran *stakeholder*. Kesesuaian atraksi wisata tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas pada setiap tahapannya dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.000 dan nilai signifikan sebesar 1.000. Hal tersebut disebabkan meskipun atraksi wisata yang ada di Kampung Wisata Cinangneng sudah sangat sesuai dengan sumberdaya alam yang ada, kebudayaan dan keahlian yang dimiliki masyarakat, namun tidak berhubungan dengan terorganisirnya komunitas karena dalam mengorganisir komunitas tergantung dengan keinginan dan kesadaran masyarakat untuk mengelola Kampung Wisata Cinangneng.

Kesesuaian pelayanan wisata tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas pada setiap tahapannya dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.049 dan nilai signifikan sebesar 0.775. Pelayanan wisata yang mendukung kegiatan wisata tidak berhubungan dalam mengorganisir komunitas. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan wisata pun anggota komunitas tetap melaksanakan tugas atau perannya masing-masing.

Peran inisiator memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.430 dan nilai signifikan sebesar 0.009. Peran inisiator memiliki hubungan yang signifikan dengan pengorganisasian komunitas pada tahap merancang tindakan bersama. Inisiator mempunyai peran dalam perencanaan kegiatan wisata dalam pembentukan pembagian tugas dengan dilakukannya rapat perencanaan bersama manajer dan kepala bagian. Ketika pembagian tugas dalam rapat perencanaan sudah dibentuk lalu pembagian tugas tersebut dikonsultasikan dengan inisiator untuk menilai dan memberikan saran baik dari pembagian tugas maupun lokasi dari setiap kegiatan. Selanjutnya pada tahap pemetaan isu, potensi dan permasalahan, merancang tindakan bersama dan tahap monitoring dan evaluasi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan peran inisiator. Hal tersebut dikarenakan inisiator selaku ketua jarang untuk mengajak rapat pengelola dalam membahas isu, potensi atau permasalahan yang ada. Inisiator juga tidak terlalu mempunyai peran dalam pelaksanaan kegiatan wisata. evaluasi kegiatan wisata pun hanya dilakukan ketika inisiator berada di Kampung Wisata Cinangneng.

Peran *stakeholder* tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas pada setiap tahapannya dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.158 dan nilai signifikan sebesar 0.357. *Stakeholder* yang berperan yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah daerah, RT dan RW. Pihak dinas membantu dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat pengelola Kampung Wisata Cinangneng dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan seperti pelatihan dalam bidang pramuwisata, *home stay*, *food and beverage services*, dll. Pemerintah daerah mengundang Kampung Wisata Cinangneng dalam kegiatan pameran sebagai bentuk upaya mempromosikan Kampung Wisata Cinangneng. RT dan RW pun ikut membantu dalam keamanan dan kebersihan sekitar Kampung Wisata Cinangneng. Para *stakeholder* membantu dalam menyukseskan pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng, namun tidak berpengaruh dalam pengorganisasian komunitas yang ada di Kampung Wisata Cinangneng karena pengorganisasian dilakukan oleh pihak internal yang mengelola Kampung Wisata Cinangneng.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu pada hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng termasuk dalam kategori cukup terorganisir. Namun, masih tidak terorganisirnya pengorganisasian komunitas pada tahap pemetaan isu, potensi dan permasalahan dan tahap merancang tindakan bersama. Hasil penelitian menunjukkan tidak semua masyarakat yang mengelola Kampung Wisata Cinangneng dalam diskusi dan rapat perencanaan kegiatan serta pengambilan keputusan yang hanya diwakilkan oleh manajer, kepala bagian serta ketua.
2. Faktor internal yang berhubungan dengan persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng yaitu tingkat pendidikan dan kapasitas individu. Tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan pengorganisasian komunitas pada tahap implementasi kegiatan dan tahap monitoring dan evaluasi. Pada tahap implementasi kegiatan, meskipun pendidikan responden rendah, masyarakat yang menjadi pengelola Kampung Wisata Cinangneng mendapatkan keahlian dan kemampuan baru karena diberikannya pelatihan. Hal tersebut menyebabkan pengorganisasian dalam pelaksanaan kegiatan wisata dapat terorganisir dengan baik karena adanya pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian para masyarakat. Pada tahap monitoring dan evaluasi, rendahnya pendidikan responden menunjukkan kurangnya kemampuannya dalam menilai pelaksanaan kegiatan wisata setelah kegiatan wisata berlangsung. Kapasitas individu memiliki hubungan yang signifikan dengan pengorganisasian komunitas pada tahap pemetaan isu, potensi dan permasalahan. Tingginya kapasitas individu dalam mengelola Kampung Wisata Cinangneng dilihat dari kemampuan responden dalam mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan Kampung Wisata Cinangneng. Kekurangan diperbaiki agar Kampung Wisata Cinangneng selalu berkembang dan mempunyai daya tarik bagi pengunjung.
3. Faktor eksternal yang berhubungan dengan persepsi responden terhadap proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata yaitu peran inisiator. Peran inisiator memiliki hubungan yang signifikan dengan pengorganisasian komunitas pada tahap merancang tindakan

bersama. Inisiator mempunyai peran dalam perencanaan kegiatan wisata dalam pembentukan pembagian tugas dengan dilakukannya rapat perencanaan bersama manajer dan kepala bagian. Perencanaan kegiatan wisata dilakukan agar kegiatan wisata dapat terkoordinasi dengan baik dengan setiap divisi. Ketika pembagian tugas dalam rapat perencanaan sudah dibentuk lalu pembagian tugas tersebut dikonsultasikan dengan inisiator untuk menilai dan memberikan saran baik dari pembagian tugas maupun lokasi dari setiap kegiatan. Inisiator mempunyai peran dalam tahap merancang tindakan bersama.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan seluruh masyarakat yang mengelola Kampung Wisata Cinangneng dilibatkan dalam kegiatan diskusi ataupun rapat perencanaan terkait pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara bersama-sama.
2. Pengorganisasian komunitas yang sudah tergolong terorganisir harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan. Hal tersebut guna memperbaiki kualitas dari kegiatan wisata agar dapat memperoleh hasil yang maksimal serta dapat meningkatkan keterlibatan anggota komunitas pada setiap kegiatan pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng. Masyarakat juga disarankan untuk mengajak masyarakat lain yang belum tergabung dalam pengelolaan Kampung Wisata Cinangneng agar manfaat dari adanya Kampung Wisata Cinangneng dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Desa Cihideung Udik.
3. Penelitian terkait proses pengorganisasian komunitas dalam pengelolaan desa wisata masih jarang dilakukan. Peneliti berharap adanya penelitian yang membahas lebih mendalam dan mengkaitkan proses pengorganisasian komunitas dengan variabel lain dalam pengelolaan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Andini N. 2013. Pengorganisasian komunitas dalam pengembangan agrowisata di desa wisata studi kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 6]; 24(3): 173-188. Tersedia pada: <http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4111>
- Bezboruah C. 2013. Community organizing for health care: an analysis of the process. *Journal of Community Practice*, 21. [Internet]. [Diunduh 2019 Juli 14]. Tersedia pada: <http://www.thecyberhood.net/documents/papers/bez13.pdf>
- Imran AN. 2012. Identifikasi kapasitas komunitas lokal dalam pemanfaatan potensi ekowisata bagi pengembangan ekowisata di Kawah Cibuni. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 13]; 23(2):85-102. Tersedia pada: <http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4120/2206>
- Isnangingtyas Y. 2017. Analisis kemitraan dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 21]; 6(3):1-15. Tersedia pada: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jp/article/view/16778>
- Junaid I, Salim MAM. 2019. Peran organisasi tata kelola dalam pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. *PUSAKA: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event* [Internet]. [Diunduh 2020 Maret 10]; 1(1):1-7. Tersedia pada: <https://ejournal-poltekparmks.ac.id/index.php/pusaka/article/view/6>
- Kusumawarta EP. 2018. Pengorganisasian komunitas oleh inovator pertanian untuk kesejahteraan masyarakat [Skripsi] [Internet]. [Diunduh 2019 Agustus 5]. Bogor(ID): Institut Pertanian Bogor. Tersedia pada: <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/92225>
- Nasdian F. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor.
- Noho Y. 2014. Kapasitas pengelolaan Desa Wisata Religius Bongo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Nasional Pariwisata* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 13]; 6(1):8-21. Tersedia pada: https://jurnal.ugm.ac.id/tourism_pariwisata/article/view/6872/5376
- Pamungkas. 2013. Ekowisata belum milik bersama: kapasitas jejaring stakeholder dalam pengelolaan

- ekowisata (studi kasus: Taman Nasional Gunung Gede Pangrango). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 13]; 24(1):49-64. Tersedia pada: <http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/4094>
- Prafitri GR, Damayanti M. 2016. Kapasitas kelembagaan dalam pengembangan desa wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 21]; 4(1):76-86. Tersedia pada: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk/article/view/591/html>
- Prasetya DB, Ansar Z. 2017. Pengembangan desa wisata berbasis *community based tourism* pada kawasan Danau Ranau Lumbok Seminung Lampung Barat. *Jurnal perencanaan Wilayah dan Kota* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 21]; 6(1):60-72. Tersedia pada: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/planomadani/article/view/2524>
- Purbasari N, Asnawi. 2014. Keberhasilan *community based tourism* di Desa Wisata Kembangarum, Pentingsari dan Nglanggeran. *Jurnal Teknik PWK* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 21]; 3(3):476-485. Tersedia pada: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/5619>
- Purmada DK, Wilopo, Hakim L. 2016. Pengelolaan desa wisata dalam perspektif *community based tourism* (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 18]; 32(2):15-22. Tersedia pada: <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1259>
- Putra DA. 2018. Data BPS: Indonesia memiliki 1.734 desa wisata [Internet]. Tersedia pada: <https://m.merdeka.com/amp/uang/data-bps-indonesia-miliki-1734-desa-wisata.html>
- Putra TR. 2013. Peran pokdarwis dalam pengembangan atraksi wisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 21]; 9(3):225-235. Tersedia pada: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/6522>
- Putri HPJ, Manaf A. 2013. Faktor-faktor keberhasilan pengembangan desa wisata di Dataran Tinggi Dieng. *Jurnal Teknik PWK* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 21]; 2(3):559-568. Tersedia pada: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/2890>
- Sidiq AJ, Resnawati R. 2017. Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 6]; 4(1):38-44. Tersedia pada: <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14208>
- Suansri P. 2003. *Community Based Tourism Handbook*. Thailand: REST Project.
- Syafi' I M, Suwandono D. 2015. Perencanaan desa wisata dengan pendekatan konsep *community based tourism* (CBT) di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. *Jurnal Ruang* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 6]; 1(2):51-60. Tersedia pada: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/article/view/85>. Yogyakarta(ID): INSIST Press.
- Undang-undang RI No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 6]. Tersedia pada: http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/4636_1364-UUTentangKepariwisataaannet1.pdf
- Wahyuni D. 2018. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* [Internet]. [Diunduh 2020 Maret 10]; 9(1):83-100. Tersedia pada: <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/994>
- Wijaya M. 2010. Kemiskinan dan pemberdayaan desa. *Journal of Rural and Development* [Internet]. [Diunduh 2019 Februari 6]; 1(1):1-9. Tersedia pada: <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/viewFile/1834/1742>